



## Strategi Lokalisasi PKL : Peranan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Wahyu Maulana, Junaidi Efendi, Devi Lestari Pramita Putri

Universitas Madura

[maulana\\_why@unira.ac.id](mailto:maulana_why@unira.ac.id)

[junaidi@unira.ac.id](mailto:junaidi@unira.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana strategi lokalisasi terhadap PKL di kabupaten Pamekasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini bukan tanpa sebab dikarenakan PKL yang merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal yang keberadaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah serta ada upaya dari pemerintah daerah itu sendiri yang mendorong sektor informal tersebut dengan capaian angka yang cukup besar selama masa jabatannya sehingga hal ini menjadi sebuah kesinambungan dan bersinergi. Hal ini tentu tidak mudah mengingat masih banyak permasalahan yang harus diluruskan sehingga memberikan solusi bersama yang saling menguntungkan. Penelitian ini dirasa *urgen* untuk dilaksanakan mengingat masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Objek penelitian merupakan paguyuban PKL yang ada di kabupaten Pamekasan. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik dalam pengambilan sampel untuk PKL di setiap paguyuban menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian perihal strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa titik diantaranya : 1. Area kawasan “Sae Salera”; 2. Area kawasan “Sae Rassah” dan 3. Area kawasan “Food Colony”. Dimana ketiga area ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan bagian strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan.

**Kata Kunci : Lokalisasi; Pedagang Kaki Lima; Perekonomian Daerah**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to see how the localization strategy for street vendors in Pamekasan district can improve the regional economy. This is not without reason because street vendors are a form of business in the informal sector whose existence has a significant impact on the regional economy and there are efforts from the regional government itself to encourage the informal sector by achieving quite large numbers during its term of office so that this to be sustainable and synergistic. This is certainly not easy considering that there are still many problems that need to be resolved so as to provide mutually beneficial joint solutions. This research is felt urgent to be implemented considering that there is still a lot of "homework" that must be completed. The research object is the street vendor association in Pamekasan district. Qualitative descriptive method used in this research. The sampling technique for street vendors in each community uses techniques purposive sampling. The results of research regarding the localization strategy carried out by the Pamekasan district government were that a special area for street vendors (zoning model) was formed which was spread across several points including: 1. The "Sae Salera" area; 2. The "Sae Rassah" area and 3. The "Food Colony" area. It is hoped that these three areas will become one of the solutions and part of the strategy carried out by the Pamekasan district regional government.*

**Keywords: Localization; Street vendors; Regional Economy**

## PENDAHULUAN

Capaian PDB sebesar 61,1% berasal dari kontribusi UMKM (PKL termasuk didalamnya) dan sisanya disumbangkan oleh para pelaku usaha besar (Sasongko, 2020) dimana hal ini memberikan gambaran bahwa perekonomian nasional disokong oleh UMKM. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bersinergi dengan UMKM ini diantaranya dengan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu cara keberpihakan pemerintah terhadap UMKM untuk terus bersinergi, memperluas akses keuangan serta pembiayaan (Setyowati, 2020), menerapkan pajak untuk UMKM sebesar 0,5% yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan wirausahawan, melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) guna menggerakkan UMKM pasca pandemi (Sasongko, 2020).

Dengan banyaknya masyarakat yang berwirausaha, menjadikan sebuah daerah lebih kokoh dan mandiri dalam hal perekonomian. Hal ini yang menjadikan salah satu faktor Bupati Pamekasan ingin meningkatkan jumlah wirausahawan (PKL maupun UMKM) di kota gerbang salam tersebut hingga mencapai 10.000 dalam masa baktinya sebagai Bupati (Humas Pamekasan, 2020). Dengan banyaknya cara yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan. Namun, hal ini belum tentu selaras dengan kondisi di lapangan. Kondisi area yang strategis dan menguntungkan pihak PKL sangat diperlukan (Agustinus, 2010) dan faktor ini yang menjadikan permasalahan terhadap PKL hingga saat ini belum terselesaikan dan kondisi ini setiap daerah mempunyai bentuk solusi serta penanganan yang berbeda.

Untuk membentuk sebuah ekosistem PKL yang memadai dan didalamnya terdapat simbiosis mutualisme maka dimulai dari sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Di Pamekasan, pemberdayaan yang telah dilakukan diantaranya dengan cara melakukan relokasi, edukasi dan motivasi melalui FGD ke beberapa paguyuban serta memberikan pelayanan namun untuk relokasi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas selain beberapa program lainnya seperti dibentuknya koperasi untuk PKL dan wisata kuliner di Pamekasan (Djaja & Maulana, 2020). Dalam hal relokasi, terdapat banyak cara diantaranya dengan menerapkan model zonasi (Ramadhan, 2015), dengan penataan terhadap PKL itu sendiri (Puspitasari, 2010), hingga pengaturan terhadap pembinaan PKL (Karim et al., 2014) serta cara lainnya sehingga cara tersebut dapat memberikan dampak berkelanjutan yang positif bagi PKL. Implementasi kebijakan seperti ini akan memberikan respon yang berbeda, ada beberapa penelitian yang pro terhadap kebijakan perihal relokasi PKL (Febrilianawati, 2010) dan (Setyaningrum, 2022) serta ada yang melakukan perlawanan terhadap akan tersebut (Prasetya & Komara, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka penelitian perihal strategi lokalisasi ini sangat urgen untuk dilakukan mengingat PKL merupakan salah satu faktor penting dalam mendongkrak perekonomian daerah. Perihal relokasi yang dilakukan secara tepat sasaran dapat memberikan dampak terhadap PKL itu sendiri baik dari sisi pendapatan (Andiny & Kurniawan, 2017) hingga memberikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat (Heriyanto, 2012) dan (Mochammad Aringga Prasetya, 2016). Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan menghasilkan sebuah strategi lokalisasi yang telah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah serta culture yang berbeda pula sehingga hal inilah yang merupakan keterbaruan dari hasil penelitian ini dan menjadikan state of the art dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merupakan keberlanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti perihal pemberdayaan PKL sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil yang berkelanjutan

Penelitian ini dilakukan guna melihat serta mengukur seberapa siap pemerintah Pamekasan dalam meramu strategi lokalisasi yang baik dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PKL sehingga PKL dapat memberikan dampak yang lebih baik dari aspek

perekonomian maupun aspek sosial. Dengan begitu, PKL selaku penyokong perekonomian daerah mendapatkan tidak hanya pemberdayaan namun juga memperoleh pelayanan maksimal dari pemerintah kabupaten Pamekasan. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut yakni dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menilai seberapa besar kesiapan pemerintah Pamekasan dalam meramu strategi lokalisasi untuk PKL. Dimana pendekatan ini nantinya dilakukan sebuah analisis yakni dengan teknik analisis interaktif yang didalamnya meliputi 3 (tiga) hal diantaranya : reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Terdapat beberapa macam lokalisasi (Chrisanto, 2014), diantaranya : a. Lokalisasi Industri. Lokalisasi industri ini dilakukan karena dengan bermunculannya banyak pabrik di Indonesia secara tidak merata maka dari itu Pemda setempat mencoba membuat suatu tempat menjadi kawasan industri. Hal ini dimaksudkan agar tidak mencemari lingkungan sekitar secara sembarangan; b. Lokalisasi Prostitusi. Secara garis besar lokalisasi adalah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan Wanita Tuna Susila (WTS) / Pekerja Seks Komersial (PSK); dan c. Lokalisasi Pedagang Kaki Lima. Lokalisasi ini sebenarnya dimaksudkan karena dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat seperti di atas trotoar maupun di tepi jalan dianggap sangat mengganggu karena telah membuat kemacetan pada daerah tersebut. Melihat hal ini Pemda langsung menindak para PKL dengan melokalisasi para PKL ke suatu tempat yang lebih aman, nyaman, dan juga terjamin.

PKL adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan menggunakan fasilitas umum sebagai media untuk menjalankan usahanya (Hariyani, 2019). PKL merupakan salah satu contoh usaha di sektor informal. Dimana sektor informal ini mempunyai beberapa kekuatan, yaitu : 1. Memiliki daya tahan dan goncangan ekonomi; 2. Dimilikinya keahlian khusus; 3. Menyerap banyak tenaga kerja; dan 4. Permodalan. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang menjadi penghambat perkembangan sektor informal, diantaranya : 1. Lemahnya akses ke lembaga keuangan; 2. Lemahnya akses ke pemerintah; 3. Pengetahuan minim mengenai manajemen bisnis; 4. Penyediaan bahan-bahan baku yang murah dan berkelanjutan; dan 5. Kurang dikuasainya teknologi baru (Feriyanto, 2014).

PKL sebagai salah sektor informal yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tentu keberadaannya sangat penting. Namun, terdapat permasalahan di dalam membangun perekonomian daerah yang disebabkan oleh beberapa perbedaan (Subandi, 2005), diantaranya : 1. Ketimpangan pembangunan di sektor industri; 2. Kurang meratanya investasi; 3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah; 4. Perbedaan sumber daya alam; 5. Perbedaan letak geografis; 6. Macetnya perdagangan antar daerah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah, diantaranya : a. Strategi pembangunan fisik; b. Strategi pengembangan dunia usaha; c. Strategi pengembangan SDM; d. Strategi pengembangan masyarakat (Arsyad, 2000). Adapun peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah meliputi 4 (empat) hal, yaitu sebagai : 1. Entrepreneur; 2. Koordinator; 3. Fasilitator; dan 4. Stimulator (Djadjuli, 2018).

## **METODE**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengukur perihal strategi lokalisasi terhadap PKL yang ada kabupaten Pamekasan apakah sudah tepat atau belum optimal sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini melibatkan paguyuban PKL kabupaten Pamekasan yang jumlahnya sebanyak 13 paguyuban

yang tersebar di beberapa titik dan APLI Pamekasan (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Seluruh Indonesia) selaku pihak mediator dari aspek pemerintah. Adapun teknik dalam pengambilan sampel untuk PKL di setiap paguyuban menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan terhadap pemecahan masalah menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yakni dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian. Dimana teknik analisis ini meliputi reduksi data, menyajikan data serta memverifikasi dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan tahapan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya : 1. Merancang model dasar penelitian sehingga memperoleh pemahaman, domain serta dimensi penelitian yang akan dilakukan strategi lokalisasi PKL di kabupaten Pamekasan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah; 2. Mengembangkan strategi pengukuran dan item pertanyaan serta memperbaiki item pengukuran dalam memperoleh data yang diinginkan; 3. Melakukan survey dan pengumpulan data secara bertahap ke berbagai pihak baik dari aspek pemerintah maupun ke para PKL di beberapa paguyuban. Hal ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data valid dalam penelitian ini untuk dianalisis pada tahap selanjutnya; dan 4. Menguji model hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membentuk sebuah ekosistem PKL yang memadai dan didalamnya terdapat simbiosis mutualisme maka dimulai dari sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Di Pamekasan, pemberdayaan yang telah dilakukan diantaranya dengan cara melakukan relokasi, edukasi dan motivasi melalui FGD ke beberapa paguyuban serta memberikan pelayanan namun untuk relokasi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas selain beberapa program lainnya seperti dibentuknya koperasi untuk PKL dan wisata kuliner di Pamekasan (Agustinus, 2010). Dalam hal relokasi, terdapat banyak cara diantaranya dengan menerapkan model zonasi (Djaja & Maulana, 2020), dengan penataan terhadap PKL itu sendiri (Ramadhan, 2015), hingga pengaturan terhadap pembinaan PKL (Puspitasari, 2010) serta cara lainnya sehingga cara tersebut dapat memberikan dampak berkelanjutan yang positif bagi PKL.

Hasil penelitian perihal strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa titik diantaranya : 1. Area kawasan “Sae Salera”; 2. Area kawasan “Sae Rassah” dan 3. Area kawasan “Food Colony”. Dimana ketiga area ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan bagian strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan. Berikut gambar ketiga area tersebut :



Gambar 1. Area kawasan “Sae Salera”



Gambar 2. Area kawasan “Sae Rassah”



Gambar 3. Area kawasan “Food Colony”

Implementasi kebijakan strategi seperti ini akan memberikan respon yang berbeda, ada beberapa penelitian yang pro terhadap kebijakan perihal relokasi PKL (Karim et al., 2014) dan (Febrilianawati, 2010) serta ada yang melakukan perlawanan terhadap akan tersebut (Setyaningrum, 2022). Guna memperoleh data yang lebih mendalam perihal strategi ini, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga hal ini yang menjadi sebuah temuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Pamekasan kedepannya. Permasalahan tersebut diantaranya :

1. Meskipun telah disediakan area khusus PKL, nyatanya PKL masih “berserakan” dan terkesan membuat kotor wilayah kota Pamekasan khususnya di sekitar wilayah monumen arek lancor dimana area ini merupakan jantung kota Pamekasan yang seharusnya menjadi pusat pemandangan yang bisa menarik para pengunjung baik itu warga Pamekasan sendiri maupun dari luar wilayah Pamekasan;



Gambar 4. PKL berserakan di jantung kota

2. Area kawasan “Food Colony” belum dikelola secara baik. Hal ini diperoleh dari salah satu PKL yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan tempat di area tersebut. Menurutnya, area tersebut seharusnya untuk para PKL yang sebelumnya telah dijanjikan untuk direlokasi namun nyatanya malah diserobot oleh PKL luar atau pendatang baru. Dengan adanya kejadian ini, maka strategi relokasi yang dirancang oleh pemerintah daerah Pamekasan bisa dikatakan belum berjalan secara optimal sehingga hal ini diperlukan tindak lanjut yang lebih konkrit untuk kedepannya yang akan berdampak kepada kesuksesan secara bersama;

3. Adanya pungli di area relokasi. Untuk mendapatkan tempat di area kawasan “Food Colony” terdapat pelanggaran yang merugikan PKL, hal ini tentu sangat miris dan diluar dugaan oleh beberapa PKL yang menginginkan tempat relokasi tersebut. Informasi ini diperoleh dari salah satu pengakuan PKL yang mengurungkan niatnya untuk berjualan di area tersebut dikarenakan dirinya diminta “setoran” atau harus membayar jika berjualan disana. Tentu hal ini menjadi tugas pemerintah daerah kabupaten Pamekasan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut;

4. Area kawasan “Food Colony” masih sepi dan banyak ruang kosong yang belum berpenghuni. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang seharusnya tidak terjadi mengingat banyaknya ruang kosong tersedia namun PKL diluar sana masih “berserakan” dan terkesan tidak mempunyai tempat untuk berjualan sehingga mereka menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.



Gambar 5. Area kawasan “Food Colony” masih kosong dan sepi

Dengan adanya permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini diharapkan adanya solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar strategi lokalisasi yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam tahapan penelitian ini, belum sepenuhnya selesai dikarenakan ada tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih sempurna

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa point penting dalam penelitian ini diantaranya : 1. Strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa titik diantaranya : a. Area kawasan “Sae Salera”; b. Area kawasan “Sae Rassah” dan c. Area kawasan “Food Colony”; 2. PKL masih “berserakan” dan terkesan membuat kotor wilayah kota Pamekasan khususnya di sekitar wilayah monumen arek lancor dimana area ini merupakan jantung kota Pamekasan yang seharusnya menjadi pusat pemandangan yang bisa menarik para pengunjung; 3. Untuk area kawasan “Food Colony” belum dikelola secara baik karena PKL yang sebelumnya telah dijanjikan untuk direlokasi namun nyatanya malah diserobot oleh PKL luar atau pendatang baru; 4. Adanya pungli untuk mendapatkan tempat di area kawasan “Food Colony”; 5. Area kawasan “Food Colony” masih sepi dan banyak ruang kosong yang belum berpenghuni.

## Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran membangun sebagai sarana menyumbang pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saran tersebut diantaranya : 1. Melakukan penertiban secara berkala (*sweeping*) terhadap para PKL yang masih menempati lokasi jantung kota yang bukan area PKL; 2. Memberikan edukasi perihal relokasi secara bertahap kepada paguyuban PKL yang bekerjasama dengan APLI selaku mitra pemerintah daerah Pamekasan; 3. Mengatur kembali aturan dan kebijakan perihal pembangunan area PKL yang digunakan untuk merelokasi sehingga target yang disasar adalah tepat sasaran; 4. Membuat *event* tertentu di area relokasi sehingga masyarakat dapat melihat serta mendengar perihal lokasi tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, T. H. (2010). *Strategi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Kota Administrasi Jakarta Utara*. UI.
- Andiny, P., & Kurniawan, A. (2017). Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima Sebelum Dan Sesudah Program Relokasi Di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 196. <http://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/download/340/260/>
- Arsyad, L. (2000). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi 1 Ce). BPFE Yogyakarta.
- Chrisanto, C. A. D. (2014). *LOKALISASI ???* Wordpress.Com. <https://clararchita77.wordpress.com/2014/04/27/lokalisasi/>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 5 (2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Djaja, M. H., & Maulana, W. (2020). The role of the du pont system to improve the financial performance of KUD Pamekasan. *Equity : Journal of Economics and Finance*, 4(3), 353–372. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4124>
- Febrilianawati, A. I. (2010). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA SURAKARTA. In *UNS-FISIP Jur. Ilmu Administrasi*. Universitas Sebelas Maret.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Hariyani, T. (2019). Pedagang Kaki Lima Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Bagi Kaum Perempuan Di Pedesaan. *Ekuivalensi*, 5(2), 174–188.
- Heriyanto, A. W. (2012). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Humas Pamekasan. (2020). *PROGRAM SEPULUH RIBU WIRAUSAHA BARU (SAPUTANGAN BIRU)*. Pamekasankab.Go.Id. <https://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru>
- Karim, L. A., Setyawan, D., & Rusmiwari, S. (2014). PENGARUH PENGATURAN TERHADAP PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 22–25.

- Mochammad Aringga Prasetya, L. F. (2016). DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO. *JKMP*, 4(2), 135–150.
- Prasetya, A., & Komara, B. D. (2019). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.30587/jre.v2i2.955>
- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 588–606.
- Ramadhan, A. (2015). Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4196>
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. DJKN.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Setyaningrum, N. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ( Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Kali Rungkut Surabaya ) SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akademik dan Memenuhi Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Strata-1 PRO*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
- Setyowati, H. E. (2020). *Melalui KUR, Pemerintah Terus Upayakan Keberpihakan Pada UMKM*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/51/melalui-kur-pemerintah-terus-upayakan-keberpihakan-pada-umkm>
- Subandi. (2005). *Sistem Ekonomi Indonesia* (Cetakan 1). Alfabeta.